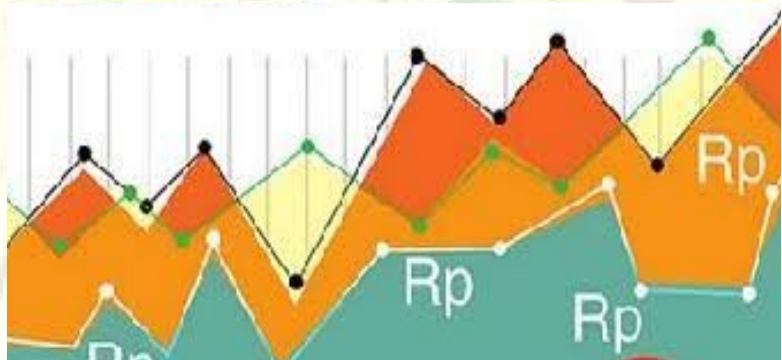


HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional)

Tahun 2019

LAPORAN AKHIR KEGIATAN



10 Oktober 2019

Kategori	Item	Harga (Rp/Kg)	Harga (Rp/Kg)
Beras	Beras Premium	12.000	11.000
	Beras Medium	11.000	10.000
	Beras Lokal	8.500	7.500
Sayuran	Tomat	16.000	14.000
	Cabai Merah Keriting	45.000	40.000
Buah-buahan	Cupang Rawit Merah	60.000	55.000
	Pisang Lokal	12.500	11.500
	Pisang Ayam Ras	40.000	38.000

DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu:

- (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia;
- (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas;
- (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

Wilayah sentra produksi pertanian khususnya bahan pangan memiliki topografi yang beragam, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, penyimpanan) bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya, sehingga keluar masuknya bahan pangan tiap saat berpotensi yang mengakibatkan jaringan Distribusi bahan pangan ditingkat masyarakat, Hal ini dapat mempengaruhi harga, perlu mendapat respon kebijakan dari pemerintah karena dapat mebnimbulkan gejolak sosial dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan Sistem Deteksi dini (*Early Warning System*) dan akurat agar dapat segera dilakukan antisivasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gejolak.

Salah satu pendekatan memperoleh data dan informasi harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (*time series*) dari sasaran yang sama.

Melalui pemantauan jaringan Distribusi dan harga Pangan akan dipeoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu, dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Dalam rangka memperkuat pemantauan jaringan distribusi dan harga pangan (pasokan pangan Akses pangan, Harga pangan dan HBKN) telah dilakukan sejak tahun 2009 yang pendanaannya oleh propinsi, untuk mendapatkan informasi harga dan akses terhadap pangan pokok dalam rangka mendeteksi informasi harga, dimaukan dana pembinaan dan pemantauan jaringan Distribusi pangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

B. DASAR PELEKSANAAN

Adapun yang menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, Anggaran 2019 ini adalah berasal dari DPA Dinas Pangan Tahun Anggaran 2019 dengan **nomor rekening 2.01.2.01.05.45.16**.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, adalah: Memberikan acuan dan informasi harga pangan secara berkala. Data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, adalah tersedianya data/informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan pasokan

pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.



BAB. II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Struktur Organisasi

Untuk menata dan mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, Pokok TA. 2019, baik untuk pengelolaan Administrasi, keuangan maupun untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan dilaksanakan oleh personil dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kabid Perkebunan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

B. Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

1. Dana

Untuk Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 10 (sepuluh) bagian kelompok dan jenis belanja dengan total dana **Rp. 53.945.815,-** (Lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan rincian dana tolak ukur sebagai mana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar Nomor Rekening, Jenis Belanja dan Jumlah Dana

Rekening	Jenis Belanja	Jumlah Dana (Rp)
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.1.01.002	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap	34.500.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	819.015,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.01.006	Belanja Bahan bakar minyak/ gas	1.344.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.430.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.06.001	Belanja cetak	340.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.06.002	Belanja penggandaan	622.800,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.800.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.11.002	Belanja makan dan minum Rapat	1.375.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.375.000,-
1.01.03.1.02.03.16.45.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.475.000,-
	Jumlah	53.945.815,-

2. Kegiatan yang dilaksanakan

a. Administrasi Kegiatan

Kegiatan Administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dibantu oleh Petugas Lapangan, pemegang Kas dan Penanggung Jawab Teknis. Beberapa Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan antara lain :

1. Membuat Surat Keputusan (SK) yang diperlukan dalam mengatur dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan
2. Mengajukan Permintaan dana kegiatan keuangan Kantor Bupati dan membuat surat pertanggung jawabnya serta melaporkan kebagian keuangan setiap bulannya
3. Membuat laporan bulanan baik kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya, laporan ini telah dilaksanakan setiap bulannya.
4. Membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan.

5. Menyusun petunjuk teknis Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan agar sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik.

b. Kegiatan fisik

Kegiatan fisik merupakan semua kegiatan yang berada diluar kegiatan administrasi. Teknis pelaksanaan kegiatan fisik akan diuraikan dibawah ini :

1. Rapat Evaluasi Kegiatan



Pelaksanaan rapat Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan peserta petugas pemantau Produksi Kecamatan yang dilaksanakan di 2 (dua) kali di Kabupaten dengan jumlah peserta adalah 25 orang dengan jadwal pelaksanaannya tanggal 26 April 2019 dan 6 November 2019 .

2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan



Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Produksi ke Pasar- pasar kecamatan untuk mengetahui stok dan ketersediaan pangan pokok di Masing masing Kecamatan pada Hari - Hari Besar Keagaman.



Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN ini dilaksanakan oleh petugas pemantau produksi di 15 (lima) Kecamatan.

BAB. III

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

A. Realisasi Keuangan

Dari dana anggaran tersedia untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, sejumlah **Rp. 53.945.815,-** secara rinci target dan realisasi keuangan dan fisik seperti tabel dibawah ini :

Tabel : Target dan Realisasi keuangan dan fisik kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN,TA. 2018.

No	Tolak Ukur	Keuangan			Fisik	
		Dana	Real.	%	Target	Real.
1	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap	34.500.000,-	34.500.000,-	100	100	100
2	Belanja alat tulis kantor	819.015,-	750.000,-	92	100	100
3	Belanja Bahan bakar minyak/gas	1.344.000,-	1.329.500,-	99	100	100
4	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.430.000,-	3.355.500,-	98	100	100
5	Belanja cetak	340.000,-	270.000,-	79	100	100
6	Belanja penggandaan	622.800,-	622.800,-	100	100	100
7	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.800.000,-	1.800.000,-	100	100	100
8	Belanja makan dan minum Rapat	1.375.000,-	1.333.750,-	97	100	100
9	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.375.000,-	7.375.000,-	100	100	100
10	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.050.000,-	3.050.000,-	100	100	100
	Jumlah	54.655.815,-	54.386.050,-	84	100	100

B. Realisasi Fisik

Pemantuan Harga Pangan Pokok telah dilakukan pada 15 (lima) Kecamatan dengan 15 (lima) belas orang petugas Pemantauan Produksi. Petugas melakukan Pemantauan Prodkusi 1 (satu) kali sebulan kemudian hasil Produksi Pangan Pokok tiap bulan dikirimkan ke Kabupaten sebagai bahan ada tidak produksi pangan pokok di setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB. IV

PENUTUP

Dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pemecahannya dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Keterlambatan Petugas dalam pengiriman laporan setiap bulanya.
2. Kesulitan dalam pengumpulan data produksi dan data keluar masuknya bahan pangan pokok di Pos – Pos Retribusi.
3. Kesulitan petugas dalam mengecek produksi dari pedagang besar di Pasar Kecamatan.
4. Kurangnya Anggaran bagi petugas pemantauan Produksi Pangan Pokok tiap bulannya.
5. Tidak terdatanya laporan harga pangan Kecamatan di Vidiotron yang ada di Pasar Kecamatan.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan diatas diharapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan hal sebagai berikut :

1. Agar petugas dapat mengirikan laporan tiap bulannya melalui Pos atau Whaashap.
2. Agar petugas dalam pemantuan produksi menunjukkan kartu/identitas pada pedagang.
3. Meningkatkan Honor atau Alat Tulis Kantor (ATK) bagi petugas Pemantauan Produksi Pangan Pokok.

4. Ada Petugas untuk mencatat laporan Distribusi keluar masuknya bahan pangan di Pos – pos Retribusi Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Data Harga Pangan yang ada dividotron di Pasar Kecamatan agar data dari Dinas Pangan.

Demikianlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN, Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan yang berpedoman kepada rincian kegiatan yang telah ditetapkan.

Painan, Januari 2020

